

## Inspeksi OPD Segera Dilakukan



*Sumber gambar :Tribunkaltim.co Minggu,09/06/2024*

### **DPRD Segera Tindaklanjuti Temuan BPK**

**BALIKPAPAN, TRIBUN** – Dalam upaya menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Balikpapan akan segera melakukan inspeksi ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Anggota DPRD Balikpapan, Parlindungan Sihotang mengatakan langkah ini diambil untuk memastikan temuan BPK ditangani dengan tepat dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Balikpapan akurat serta efektif. "Pansus saat ini masih dalam tahap menggali dan memahami temuan-temuan yang dilaporkan BPK. Kemarin hasil pertemuannya belum sampai ke rekomendasi," katanya, Sabtu (8/6).

Parlindungan juga menekankan bahwa banyak temuan BPK bersifat administrasi, seperti kelupaan serah terima aset. "Kalau hanya administrasi, berarti tidak terlalu bermasalah. Artinya, hanya di internal dinas saja ya mungkin agak mudah menyelesaikan," ungkapnya.

Pansus menilai bahwa sebelum rekomendasi diterbitkan oleh DPRD Balikpapan, diperlukan sinkronisasi antara temuan BPK dengan dinas-dinas terkait. Hal ini bertujuan agar rekomendasi yang dikeluarkan tepat sasaran dan efektif dalam perbaikan administrasi serta pengelolaan keuangan daerah. Parlindungan juga menekankan bahwa banyak temuan BPK bersifat administratif, seperti kelupaan serah terima aset. "Kalau hanya administrasi, berarti tidak terlalu bermasalah. Artinya, hanya di internal dinas saja ya mungkin agak mudah menyelesaikan," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi manipulasi harga atau kecurangan lain yang signifikan. Langkah selanjutnya, menurut Parlindungan, adalah menginvestigasi lebih dalam rekomendasi BPK. Pansus akan mempertimbangkan untuk melakukan inspeksi lapangan jika diperlukan guna memastikan pemahaman yang jelas atas setiap temuan dan rekomendasi. “Kalau misalnya harus sidak ke lapangan, kita akan cek di lapangan apa yang kurang. Kenapa muncul rekomendasi ini,” terangnya.

Selain itu, Parlindungan menekankan pentingnya kerapian administrasi dan komunikasi antar dinas untuk mencegah masalah serupa di masa depan. “Biar sama-sama memahami apa yang kurang. Yang kami lihat dari rekomendasi hanya itu, masalah ketertiban administrasi saja. Mudah-mudahan adanya rekomendasi ini menjadi teguran ke kita supaya tidak terulang,” jelasnya.

Parlindungan juga berharap agar Pemkot Balikpapan lebih selektif dalam menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan keahlian dan minat mereka. “Misalnya *passion*-nya teknik, ya jangan taruh di bidang administrasi karena dia akan frustrasi juga. Kemudian diharapkan supaya ada juga semacam *reward* bagi ASN yang sudah bekerja baik, yang tidak baik ya kasih dia *punishment*. Jadi *check and balance* juga jalan,” harapnya.

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Balikpapan berkomitmen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

“Pansus akan terus bekerja keras untuk memastikan setiap temuan BPK ditangani dengan serius dan rekomendasi yang dikeluarkan benar-benar membawa perbaikan nyata dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegaskan. **(znl)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Inspeksi OPD Segera Dilakukan, 09/06/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004), pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU 15/2024, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU 15/2024, Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.